

Modul 2

Kebijakan, Proses, dan Tata Kelola TIK untuk Pembangunan

- SESI 1: PENGEMBANGAN KEBIJAKAN ICTD

Penulis: Emmanuel C. Lallana, PhD



ICTD

- ICTD bukan hanya tentang membangun industri atau sektor ekonomi, TIK tetapi juga mencakup **penggunaan TIK untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan juga pertumbuhan sosial dan politik.**
- TIK dan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs)

Pengembangan Kebijakan ICTD 1 – Model Kebijakan TIK

- Penggunaan TIK untuk pembangunan membutuhkan dorongan kebijakan publik yang proaktif.
 - Kebijakan – “rencana aksi yang seksama sebagai pedoman pengambilan keputusan dan untuk mencapai hasil yang rasional.”
 - Kebijakan publik - “Rangkaian aksi atau non-aksi yang dipilih oleh otoritas publik untuk mengatasi masalah.”

Pengembangan Kebijakan ICTD 1 – Model Kebijakan TIK

- **Kebijakan publik adalah apa yang diartikulasikan dalam keputusan dan dokumen termasuk juga apa yang diterapkan oleh pemerintah.**

Pengembangan Kebijakan ICTD 1 – Model Kebijakan TIK

- Pembuatan kebijakan publik tidak muncul dalam “kekosongan”
 - Kebijakan baru selalu dibuat dalam batasan-batasan dari kebijakan yang sudah ada.
 - Intervensi kebijakan disusun secara institusional, artinya mereka berlandaskan pada, dan harus memperhitungkan, struktur yang lebih dalam dari ‘*multiple enterprises*’.

Pengembangan Kebijakan ICTD 1 – Model Kebijakan TIK

- **Solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua *stakeholders***
 - Kebijakan yang ada selalu menggambarkan keseimbangan kekuatan dalam pemerintahan.

- **Kebijakan publik mempunyai akibat yang tidak diharapkan**
 - Komputerisasi catatan pertanahan di Karnataka

Pengembangan Kebijakan ICTD 1 – Model Kebijakan TIK

- *World Summit on the Information Society*
 - Kebijakan yang menciptakan iklim yang mendukung kestabilan, prediktabilitas dan persaingan sehat di semua tingkat perlu dikembangkan dan diimplementasikan dalam cara yang tidak hanya menarik investor swasta untuk pengembangan infrastruktur TIK tetapi juga memungkinkan *universal service obligations* dapat dicapai di area-area dimana kondisi pasar tradisional tidak bekerja.

Pengembangan Kebijakan ICTD 1 – Model Kebijakan TIK

- *Best Practices for Telecommunications Reform*
 - Pemerintah seharusnya tidak menjadi penyedia layanan telekomunikasi.... Peranan pemerintah adalah menjadi penanggungjawab perencanaan, strukturisasi, dan pengaturan.

Pengembangan Kebijakan ICTD 1 – Model Kebijakan TIK

- *Best Practices for Telecommunications Reform*
 - **Keberhasilan usaha akses universal akan sangat bergantung pada suksesnya privatisasi dan persaingan.**
 - Faktor keuntungan yang paling signifikan dari investasi *rural* lebih terkait pada variabel kebijakan (khususnya interkoneksi dan tarif) ketimbang variabel resiko dan keuangan.

Pengembangan Kebijakan ICTD 1 – Model Kebijakan TIK

- Pasar itu penting; pasar membantu pengalokasian sumber daya, memastikan sumber daya tersebut tersebar merata, yang sangat penting ketika sumber daya tersebut langka... [tetapi] sama pentingnya... [adalah] memperkuat pemerintah dan menetapkan, untuk setiap negara karena tiap negara mencapai tingkat pengembangannya masing-masing bagaimana bentuk kerja sama antara pemerintah dan pasar

Pengembangan Kebijakan ICTD 1 – Model Kebijakan TIK

- *Best Practices for Telecommunications Reform*
 - Diperlukan pengatur (regulator) yang independen, punya dana cukup dan kompeten dari sisi teknis, untuk memberikan lisensi, mendorong kompetisi, dan melindungi kepentingan publik.

Pengembangan Kebijakan ICTD 1 – Model Kebijakan TIK

- ***Peran LSM (menurut ADB)***
 - Salah satu kekuatan LSM adalah menjembatani komunitas dan merespon kebutuhan lokal.

Pengembangan Kebijakan ICTD 1 – Model Kebijakan TIK

➤ *Peran LSM (menurut ADB)*

- *NGO menggunakan pendekatan inovatif untuk pembangunan, membantu memastikan proyek terimplementasi sesuai dengan yang diharapkan, memelihara kelanjutan proyek, menyokong peningkatan transparansi dan tata kelola yang baik, dan menyuarakan golongan marginal dan/atau lemah*

Pengembangan Kebijakan ICTD 1 – Model Kebijakan TIK

➤ *Post Washington Consensus*

- Kosakata dalam paradigma kebijakan baru... termasuk masyarakat madani, pembangunan institusi, jaringan keselamatan, dan khususnya tata kelola, akan ditambahkan ke terminologi konvensional Washington seperti ‘pasar terbuka’, ‘deregulasi’, ‘liberalisasi’ dan ‘penyesuaian struktur’.

Pengembangan Kebijakan ICTD 1 – Model Kebijakan TIK

- Aktivitas Kelompok: ***Bagaimana komposisi anda?***
 - Masing-masing wakil/tim negara akan menilai
 - Peran saat ini dari **pemerintah, pasar, dan LSM** terhadap strategi ICTD negara (misal: 40% pemerintah and 60% pasar)
 - Komposisi **ideal** dari **pemerintah, pasar, dan LSM** dalam pengembangan TIK negara

Pengembangan Kebijakan ICTD 2 – Penyusunan Kebijakan TIK *Multi-stakeholder*

- *World Summit on Information Society*
 - *Pemerintah, dan juga sektor swasta, masyarakat madani, PBB, dan organisasi internasional lainnya memiliki peranan dan tanggung jawab penting pada pembangunan Masyarakat Informasi dan, tentunya, dalam proses pengambilan keputusan.*
Membangun Masyarakat Informasi yang berpusat pada masyarakat adalah usaha bersama yang membutuhkan kerjasama dan kemitraan diantara semua stakeholder.

Pengembangan Kebijakan ICTD 2 – Penyusunan Kebijakan TIK *Multi-stakeholder*

- **Stakeholder** adalah “setiap orang yang secara signifikan *mempengaruhi* atau *terpengaruhi* oleh aktivitas pengambilan keputusan orang lain.”

Pengembangan Kebijakan ICTD 2 – Penyusunan Kebijakan TIK *Multi-stakeholder*

- **Memajukan inklusifitas dan keseimbangan dalam kebijakan dan implementasi TIK;**
- **Memperluas kemampuan analisis untuk menghadapi isu kebijakan TIK;**
- **Memajukan mobilisasi dan partisipasi masyarakat umum;**
- **Memajukan pengembangan rencana aksi yang terfokus dan holistik;**
- **Memupuk usaha berbagi keterampilan dan inovasi;**

Pengembangan Kebijakan ICTD 2 – Penyusunan Kebijakan TIK *Multi-stakeholder*

- Menyediakan *platform* penting untuk melatih ahli-ahli baru;
- Menciptakan keseimbangan antara orientasi pasar dan orientasi pengembangan;
- Mendorong tata kelola yang baik karena kemitraan memberikan kesempatan bagi kelompok berbeda untuk mengidentifikasi konflik, kesenjangan dan kesamaan diantara kebijakan dan program mereka masing-masing, dan untuk memperbaiki kelanjutan kerjasama mereka;
- Memungkinkan partisipan untuk memperkuat sumber daya finansialnya;

Pengembangan Kebijakan ICTD 2 – Penyusunan Kebijakan TIK *Multi-stakeholder*

- **Memotivasi baik para pemimpin dan yang tertinggal – mengingat, kemitraan menciptakan *platform* untuk mendorong mereka yang komitmennya terbatas dan untuk menghadirkan aktor-aktor progresif bersama-sama;**
- **Memupuk kepemilikan dan komitmen akan tindakan; dan**
- **Membantu mengembangkan kepercayaan antar kelompok yang biasanya saling mencurigai dan bermusuhan.**

Pengembangan Kebijakan ICTD 2 – Penyusunan Kebijakan TIK *Multi-stakeholder*

- **Analisis *stakeholder*** “mengacu pada sekumpulan perangkat untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan *stakeholder* berdasarkan atribut, hubungan, dan kepentingan yang terkait pada isu atau sumber daya yang ada.”

Pengembangan Kebijakan ICTD 2 – Penyusunan Kebijakan TIK *Multi-stakeholder*

- Dalam melakukan analisis *stakeholder*, langkah-langkah yang perlu diperhatikan:
 - Identifikasi tujuan utama dari analisis.
 - Membangun pemahaman akan sistem dan pembuat keputusan dalam sistem.
 - Identifikasi *stakeholder* utama.

Pengembangan Kebijakan ICTD 2 – Penyusunan Kebijakan TIK *Multi-stakeholder*

- Dalam melakukan analisis *stakeholder*, langkah-langkah yang perlu diperhatikan (lanjutan):
 - Investigasi kepentingan, karakteristik dan keadaan *stakeholder*.
 - Identifikasi pola dan konteks interaksi antar *stakeholder*.
 - Menetapkan pilihan-pilihan untuk manajemen.

Pengembangan Kebijakan ICTD 2 – Penyusunan Kebijakan TIK *Multi-stakeholder*

- Aktivitas kelompok: Identifikasi para *stakeholder*
 - Kelas dibagi dalam empat kelompok
 - **Setiap kelompok akan melakukan analisis *stakeholder* untuk salah satu proyek ICTD berikut:**
 - ***e-Health* atau *Telemedicine***
 - ***e-Learning* atau TIK untuk Pendidikan**
 - ***e-Agriculture* atau TIK untuk Pembangunan Desa**
 - **TIK dan Sumber Daya Alam**

Modul 2

Kebijakan, Proses, dan Tata Kelola TIK untuk Pembangunan

- SESI 2: Unsur-unsur Kebijakan ICTD

Penulis : Emmanuel C. Lallana, PhD



Unsur-unsur Kebijakan ICTD

- **Sasaran utama kebijakan nasional ICT4D adalah untuk menyeimbangkan manfaat dan resiko dari perluasan penggunaan TIK yang konsisten dengan tujuan pembangunan nasional.**
- **Membangun kebijakan nasional TIK bukanlah sebuah aktivitas sekali saja.**

Unsur-unsur Kebijakan ICTD

➤ Korea

- **Basic Informatization Promotion Plan (1996 – 2000)** dengan visi untuk mencapai tingkatan informatisasi tingkat dunia di tahun 2010;
- **Cyber Korea 21 (1999-2002)** dengan visi membangun masyarakat berbasis pengetahuan yang terdepan;
- **E- Korea vision 2007 (2002-2007)** dengan visi *Build e-Korea as the global leader.*
- **Broadband IT Korea Vision 2007**

Unsur-unsur Kebijakan ICTD

- **Harap dicatat**
- **Presentasi ini tidak mendiskusikan pembangunan infrastruktur informasi nasional — yaitu, jaringan *broadband* yang mampu mengirimkan informasi berupa suara, data, teks, gambar dan video (multimedia) secara interaktif untuk melayani kebutuhan informasi negara.**
- **Juga tidak akan mendiskusikan *eGovernance* dan *eGovernment***

Unsur-unsur Kebijakan ICTD 1

Pengembangan Kapasitas Manusia

- **Teknologi apapun tidak akan cukup jika orang-orang tidak memahami bagaimana cara memanfaatkannya secara efektif dalam kehidupan atau pekerjaan mereka.**
 - Penting bagi orang-orang untuk memahami potensi lebih luas dari teknologi, sehingga pemakai mampu untuk menginovasi diri mereka dan menggunakan teknologi dengan kreatif yang mungkin tidak diimpikan oleh proyek atau kebijakan.

Unsur-unsur Kebijakan ICTD 1

Pengembangan Kapasitas Manusia

- Dua isu umum:
 - **Memastikan bahwa semua warga negara mempunyai kemampuan dasar untuk berhasil di Era Informasi.**
 - **Mengembangkan keahlian TIK spesialis sehingga sektor TIK negara dan ekonomi pada umumnya berkembang secara terus menerus.**

Unsur-unsur Kebijakan ICTD 1

Pengembangan Kapasitas Manusia

- **Keberhasilan dalam masyarakat informasi membutuhkan keterampilan yang berbeda dengan keterampilan yang dibutuhkan di masyarakat industri.**
- **Keterampilan Literasi TIK**
 - Standar Nasional Inggris untuk orang dewasa: kemampuan membaca, menghitung, dan TIK
- **'Keterampilan abad 21'**
 - Kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, literasi informasi, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan berpikir lainnya yang lebih tinggi

Unsur-unsur Kebijakan ICTD 1

Pengembangan Kapasitas Manusia

- TIK dalam Pendidikan – Yang kita ketahui
 - **TIK dapat memberdayakan guru dan murid, mendorong perubahan dan membantu pengembangan keterampilan abad 21.**
 - **Tetapi TIK jarang dianggap sebagai pusat proses pembelajaran (bahkan di negara–negara OECD).**
 - ***Do not put technology before education.***

Unsur-unsur Kebijakan ICTD 1

Pengembangan Kapasitas Manusia

- TIK dalam Pendidikan – Yang kita ketahui 2
 - **Dampak positif TIK dalam pendidikan lebih terlihat saat dihubungkan ke pedagogi.**
 - **TIK kurang efektif (atau bahkan mungkin tidak efektif) saat tujuan penggunaannya tidak jelas.**
 - **Terjadi perbedaan pandangan antara pedagogi ‘baru’ dan ujian terstandarisasi dengan yang tradisional.**

Unsur-unsur Kebijakan ICTD 1

Pengembangan Kapasitas Manusia

- TIK dalam Pendidikan – Yang kita ketahui 3
 - **Ketidakcocokan antara metode yang digunakan untuk mengukur dampak dengan jenis pembelajaran yang dilakukan.**
 - **Pengguna percaya bahwa TIK memberikan perbedaan positif.**

Unsur-unsur Kebijakan ICTD 1

Pengembangan Kapasitas Manusia

- **MEMBANGUN KETERAMPILAN TIK SPESIALIS**
 - **Total kebutuhan profesional dalam industri suplai TIK diramalkan terus naik tajam mencapai sekitar 17 juta di tahun 2010.**
 - **Permintaan profesional di sektor pengguna TIK akan meningkat lebih cepat sampai 73 juta di tahun 2010.**

Unsur-unsur Kebijakan ICTD 1

Pengembangan Kapasitas Manusia

- MEMBANGUN KETERAMPILAN TIK SPESIALIS
 - **'HOT SKILLS'** di tahun 2010 adalah: *enterprise architecture*, kepemimpinan proyek, rekayasa ulang proses bisnis, perencanaan, penganggaran, dan penjadwalan proyek, *third-party provider manager*, analisis sistem, perancangan sistem, perancangan jaringan, audit sistem, perencanaan dan manajemen keamanan TI, dan *storage administrator*

Unsur-unsur Kebijakan ICTD 1

Pengembangan Kapasitas Manusia

- MEMBANGUN KETERAMPILAN TIK SPESIALIS
 - 'COLD SKILLS': pemrograman, *routine coding*, pengujian sistem, *support* dan *helpdesk*, dan *legacy skills*
 - <http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=112360&pageNumber=3>

Unsur-unsur Kebijakan ICTD 1

Pengembangan Kapasitas Manusia

- MEMBANGUN KETERAMPILAN TIK SPESIALIS
- Peran pemerintah
- **Kontrol tegas pada mutu pendidikan yang diberikan dengan pemantauan terus menerus akan kurikulum pendidikan TIK dan pedagoginya, melalui otoritas nasional;**

Unsur-unsur Kebijakan ICTD 1

Pengembangan Kapasitas Manusia

- MEMBANGUN KETERAMPILAN TIK SPESIALIS
- Peran pemerintah (lanjutan)
- **Pendirian pusat sertifikasi keterampilan nasional dan regional yang mengikuti pola ujian seorang akuntan tersertifikasi (yang harus lulus untuk dapat menerima sertifikasi untuk praktek); dan**

Unsur-unsur Kebijakan ICTD 1

Pengembangan Kapasitas Manusia

- MEMBANGUN KETERAMPILAN TIK SPESIALIS
- Peran pemerintah (lanjutan)
- **Interaksi yang terus menerus antara industri TIK, pemerintah dan institusi pendidikan dalam rangka mengembangkan dan merancang kursus yang mengajarkan keterampilan dan pengetahuan TIK yang sesuai, termasuk keterampilan kognitif.**

Unsur-unsur Kebijakan ICTD 1

Pengembangan Kapasitas Manusia

- Aktivitas kelompok: Prioritas Pembangunan Kapasitas – sebuah Debat.
- **Peserta pelatihan akan dipecah menjadi dua kelompok: kelompok satu akan berargumen bahwa TIK dalam Pendidikan menjadi prioritas pemerintah dan kelompok lainnya akan memperjuangkan pengembangan keahlian TIK spesialis.**
- Diskusi Kelompok (20 menit)
- Presentasi (40 menit; dibagi sebagai berikut - 10 min untuk presentasi satu kelompok, 5 menit untuk membantah dan 5 menit untuk menanggapi)

Unsur-unsur Kebijakan ICTD 2

Membangun Industri TIK

- Tiga area:
- **Pabrik TIK atau Perangkat Keras**
- ***Offshoring***
 - Pengembangan Piranti Lunak Global
 - *Contact Centers, Business Process Outsourcing (BPO)*
- **Industri Konten Dijital**

Unsur-unsur Kebijakan ICTD 2

Membangun Industri TIK

- Pabrik TIK atau Perangkat Keras
 - **Sektor pabrik perangkat keras TIK adalah sektor industri pabrikan yang paling besar dan paling cepat perkembangannya di dunia**
 - **Sebagian besar perkembangan terjadi di negara-negara industri baru di Asia.**

Unsur-unsur Kebijakan ICTD 2

Membangun Industri TIK

- ***Offshoring*** tren dimana fungsi pekerjaan dipindahkan ke luar negeri untuk mengurangi biaya.
- ***Forrester Research*** memperkirakan bahwa pada 2015 sebanyak 3,3 juta pekerjaan di AS dan upah sebesar USD 136 milyar dapat berpindah ke negara-negara seperti Cina, India dan Rusia.

Unsur-unsur Kebijakan ICTD 2

Membangun Industri TIK

➤ *Offshoring*

- *Global Software Development*

- **“Piranti lunak yang dikerjakan di lokasi geografis terpisah melewati batas negara dengan cara koordinasi melibatkan interaksi *real time (synchronous)* maupun *asynchronous*”.**

Unsur-unsur Kebijakan ICTD 2

Membangun Industri TIK

➤ *Offshoring*

● *Global Software Development*

- **40% perusahaan Fortune 500 menggunakan GSD**
- **Hingga 50 negara berpartisipasi dalam GSD.**
- **80% hasil industri piranti lunak Irlandia diekspor**

Unsur-unsur Kebijakan ICTD 2

Membangun Industri TIK

➤ *Offshoring*

● **Contact Centers, Business Process Outsourcing (BPO)**

- Industri *outsourcing offshore* mengalami peningkatan yang signifikan.
- **India, Filipina, Eropa Tengah dan Eropa Timur mengalami laju pertumbuhan sekitar 25–60% *Compounded Annual Growth Rate(CAGR)*** (bandingkan dengan 10-12% untuk *outsourcing global contact center* selama tiga tahun terakhir.)
- <http://www.tmcnet.com/channels/call-center-outsourcing/articles/23699-research-shows-growth-trends-outsourcing-contact-center-market.htm>

Unsur-unsur Kebijakan ICTD 2

Membangun Industri TIK

- Offshoring
 - **Contact Centers, Business Process Outsourcing(BPO)**
 - **India dan Filipina adalah pemimpin *offshore* untuk layanan berbahasa Inggris**
 - Setiap lokasi memiliki *trade-off* masing-masing antara biaya, resiko operasi, kematangan pasokan dan penyesuaian kebutuhan spesifik terhadap daerah klien.

Unsur-unsur Kebijakan ICTD 2

Membangun Industri TIK

- Industri Konten Digital
- konvergensi konten tradisional, media dan hiburan, piranti lunak dan multimedia, serta perangkat keras elektronik dan telekomunikasi.
- **diantaranya efek visual dan animasi (termasuk *virtual reality* dan produk tiga dimensi), multimedia interaktif (seperti situs web, CD-ROM), permainan komputer (termasuk yang *online*), multimedia untuk pendidikan (*e-learning*), dan produksi TV dan film digital, dan pasca-produksi TV dan film.**

Unsur-unsur Kebijakan ICTD 2

Membangun Industri TIK

- Industri konten digital sedang meledak.
 - **Pendapatan permainan komputer di tahun 2001 melebihi penjualan tiket film *box office* dan mendekati pendapatan global industri rekaman musik.**

Unsur-unsur Kebijakan ICTD 2

Membangun Industri TIK

- Industri konten digital sedang meledak.
 - **PricewaterhouseCoopers (PwC), sebuah lembaga konsultasi TIK, memperkirakan bahwa pertumbuhan pasar *game* akan mencapai USD 46,5 miliar di tahun 2010.**
 - Asia Pasifik masih akan memegang posisi tertinggi dalam hal pengeluaran pada *game*, pasar akan tumbuh dari USD 9,8 miliar di tahun 2005 menjadi USD 17,4 miliar di tahun 2010.

Unsur-unsur Kebijakan ICTD 2

Membangun Industri TIK

- Aktivitas kelompok
- MENENTUKAN PRIORITAS SEKTOR INDUSTRI TIK
 - Kelas akan dibagi dalam tiga kelompok.
 - **Setiap kelompok diminta memilih salah satu dari tiga area industri TIK untuk dikembangkan (seperti misalnya, perangkat keras, piranti lunak, industri konten) dan mempresentasikan hasilnya.**

Modul 2

Kebijakan, Proses, dan Tata Kelola TIK untuk Pembangunan - SESI 3: TATA KELOLA TIK



Tata Kelola TIK

- **“penyusunan spesifikasi dari kerangka kerja akuntabilitas dan hak keputusan untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan TIK.”**
 - Tata Kelola TIK menentukan siapa yang membuat keputusan akhir tentang TIK dalam organisasi, dalam hal ini, pemerintah. Ini berbeda dari ‘manajemen’ TIK yaitu tentang proses pembuatan dan implementasi keputusan terkait TIK.

Tata Kelola TIK

- Ada beberapa alasan mengapa penyusun kebijakan perlu fokus ke tata kelola TIK:
 - **TIK itu mahal**
 - **Penyerapan TIK makin meningkat**
 - **TIK menciptakan ancaman dan kesempatan strategis**
 - **Nilai TIK bergantung tidak hanya pada teknologi yang bagus**

Tata Kelola TIK

- **Kerangka Kerja Tata Kelola TIK**
 1. sekumpulan prinsip
 2. hirarki pengambilan keputusan
 3. proses pengawasan dan pelaporan yang disesuaikan dengan kebutuhan

Kerangka Kerja Tata Kelola TIK - Prinsip

- Enam Prinsip Tata Kelola TIK di Australia
 - **Menetapkan tanggungjawab yang dimengerti dengan jelas untuk TIK.** Memastikan bahwa individu dan kelompok dalam organisasi mengerti dan menerima tanggungjawab mereka untuk TIK.

Kerangka Kerja Tata Kelola TIK - Prinsip

- Enam Prinsip Tata Kelola TIK di Australia
 - **Merencanakan TIK untuk mendukung kebutuhan organisasi.** Memastikan bahwa rencana TIK cocok dengan kebutuhan organisasi saat ini dan yang akan datang dan juga mendukung rencana perusahaan

Kerangka Kerja Tata Kelola TIK - Prinsip

- Enam Prinsip Tata Kelola TIK di Australia
 - **Mendapatkan validitas TIK.** Memastikan bahwa akuisisi TIK dibuat untuk alasan yang benar dan dengan cara yang benar, berlandaskan pada analisis yang layak dan terus berlangsung. Memastikan adanya keseimbangan antara biaya, resiko, keuntungan jangka pendek dan jangka panjang.

Kerangka Kerja Tata Kelola TIK - Prinsip

- Enam Prinsip Tata Kelola TIK di Australia
 - **Memastikan TIK berkinerja bagus kapanpun dibutuhkan.** Memastikan bahwa TIK cocok terhadap tujuannya dalam mendukung organisasi, yaitu tetap responsif terhadap perubahan kebutuhan bisnis, dan memberikan dukungan terhadap bisnis kapanpun dibutuhkan.

Kerangka Kerja Tata Kelola TIK - Prinsip

- Enam Prinsip Tata Kelola TIK di Australia
 - **Memastikan kesesuaian TIK.** Memastikan bahwa TIK sesuai dengan semua peraturan eksternal dan mengikuti semua kebijakan dan praktek internal.
 - **Memastikan penggunaan TIK menghargai faktor manusia.** Memastikan bahwa TIK memenuhi kebutuhan saat ini dan perubahan kebutuhan dari semua orang dalam prosesnya.

Kerangka Kerja Tata Kelola TIK - Hirarki

- **monarki bisnis (*business monarchy*)** – Menteri/Sekretaris atau Sekretaris Jenderal (atau *counterpart* pemerintah dari eksekutif bisnis atau eksekutif individu) membuat keputusan TIK
- **monarki TI (*IT monarchy*)** – profesional TIK di pemerintah (seperti CIO pemerintah atau gCIO) membuat keputusan

Kerangka Kerja Tata Kelola TIK - Hirarki

- **feodal** – kepala unit operasional (contohnya biro, kantor dan/atau departemen) membuat keputusan TIK
- **federal** – pejabat senior dalam Kementerian/Departemen dan kepala kantor membuat keputusan; mungkin juga termasuk eksekutif TI sebagai partisipan tambahan

Kerangka Kerja Tata Kelola TIK - Hirarki

- **Duopoli IT (*IT duopoly*)** – eksekutif TIK (gCIO) dan satu kelompok lainnya (yaitu biro, departemen) membuat keputusan TIK
- **anarki** – setiap pemakai individu membuat keputusan

Kerangka Kerja Tata Kelola TIK - Pemantauan

- ***Better Practice Checklist*** – Manajemen Aset TIK
 - **Australian Government's Information Management Office (AGIMO)**

Kerangka Kerja Tata Kelola TIK - Pemantauan

- *Better Practice Checklist* – Manajemen Aset TIK
 - **Secara umum**
 - Apakah Anda mengerti daur hidup manajemen aset?
 - Apakah Anda mengetahui prinsip-prinsip manajemen aset?
 - **Mengembangkan kerangka kerja manajemen TIK**
 - Apakah Anda telah membuat kebijakan yang mencakup manajemen aset TIK?
 - Apakah Anda telah menghubungkan aset terdaftar ke proses pengadaan dan pembuangan?
 - Apakah Anda telah memperhatikan pilihan akuisisi dan pembuangan yang ramah lingkungan?

Tata Kelola TIK – Mengelola Pembelanjaan

- *Whole-of-Government ICT Investment Principles Australia*
 - **Prinsip 1: Pemerintah harus diberikan informasi yang cukup dari perspektif lembaga dan *whole-of-government* sehingga dapat dilakukan kajian yang tepat akan alokasi dana untuk proyek dan program perubahan bisnis menggunakan TIK.**

Tata Kelola TIK – Mengelola Pembelanjaan

- *Whole-of-Government ICT Investment Principles Australia*
 - Prinsip 2: **Lembaga bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang efektif, efisien dan etis untuk menyampaikan kebutuhan pemerintah... Lembaga akan memastikan bahwa mereka memiliki proses tata kelola dan pemantauan untuk pencapaiannya.**

Tata Kelola TIK – Mengelola Pembelanjaan

- *Whole-of-Government ICT Investment Principles Australia*
 - **Prinsip 3: Investasi di kemampuan bisnis baru yang melibatkan TIK harus terjustifikasi dan diukur terhadap biaya dan keuntungan.**

Tata Kelola TIK – Mengelola Pembelanjaan

- *Whole-of-Government ICT Investment Principles Australia*
 - Prinsip 4: **Lembaga bertanggung jawab atas pengukuran hasil yang dicapai oleh TIK dan pengembalian investasi TIK dan untuk berbagi pembelajaran diantara pemerintah pada titik-titik penting di daur hidup tiap proyek.**

Tata Kelola TIK – Mengelola Pembelanjaan

- *Whole-of-Government ICT Investment Principles Australia*
 - **Prinsip 5: (Departemen) Keuangan bertanggung jawab atas pengembangan, berkonsultasi dengan lembaga-lembaga, Kerangka Kerja yang membantu lembaga untuk mencapai penggunaan TIK yang efisien dan efektif oleh Pemerintah Australia...**

Tata Kelola TIK – Mengelola Pembelanjaan

- *Whole-of-Government ICT Investment Principles Australia*
 - Prinsip 5 (lanjutan): ... (Departemen) Keuangan akan melaksanakannya melalui: memfasilitasi penggunaan ulang (*reuse*); interoperabilitas; berbagi dan kolaborasi; mendorong penggunaan standar; dan pedoman strategi untuk lembaga serta saran untuk Pemerintah dalam investasi TIK.

Tata Kelola TIK – Mengelola Pembelanjaan

- *Whole-of-Government ICT Investment Principles Australia*
 - Prinsip 6: **Lembaga pusat akan mendukung lembaga lainnya untuk meningkatkan keahlian dalam mengelola investasi TIK dengan koordinasi penyediaan informasi, perangkat, dan pelatihan.**

Tata Kelola TIK

- Aktivitas Kelompok – Tata Kelola TIK
 - **Kelas dibagi menjadi 4 kelompok**
 - **Setiap kelompok melakukan pemeringkatan Prinsip-prinsip Tata Kelola TIK Australia dari yang paling mudah sampai yang paling susah untuk diimplementasikan.**

Tata Kelola TIK

- 6 Prinsip Tata Kelola TIK Australia
 - 1) Menetapkan tanggungjawab yang dimengerti dengan jelas untuk TIK.**
 - 2) Merencanakan TIK untuk mendukung kebutuhan organisasi.**
 - 3) Mendapatkan validitas TIK.**
 - 4) Memastikan TIK berkinerja bagus kapanpun dibutuhkan.**
 - 5) Memastikan kesesuaian TIK.**
 - 6) Memastikan penggunaan TIK menghargai faktor manusia.**

Kesimpulan

- Topik yang diulas:
 - **1. Pengembangan Kebijakan ICTD**
 - **Model Kebijakan TIK**
 - **Pembuatan Kebijakan TIK *Multi-stakeholder***
 - **2. Unsur-unsur Kebijakan ICTD**
 - **Pengembangan Kapasitas Manusia**
 - **Membangun Industri TIK**
 - **3. Tata Kelola TIK**



TERIMA KASIH